SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: p-ISSN 2615-3009
Economic, Accounting, Management and Business e-ISSN 2621-3389
Vol. 9, No. 1, January 2026

Peran Audit BPK dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Provinsi NTT Kota Kupang

Stefani Vanya[1], Odilia Aftrin[2], Audy Pasaribu[3], Karolina Anu[4], Alberta Ata[5], Susana Purnamasari Baso[6]
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia
dhesylapur@gmail.com[2], audypasaribu09@gmail.com[3], karlinanu21@gmail.com[4], bertaata445@gmail.com[5], Purnamabaso@gmail.com[6]
Email Korespondensi : Stefaniannavanya132@gmail.com

Submitted: 04th Dec 2025 | **Edited**: 24th Dec 2025 | **Issued**: 01st January 2026

Cited on: Vanya, S., Aftrin, O., Pasaribu, A., Anu, K., Ata, A., & Baso, S. P. (2026). Peran Audit BPK dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Provinsi NTT Kota Kupang. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business, 9*(1), 199-206.

ABSTRACT

Strengthening transparency and accountability in regional financial management remains a critical challenge in the implementation of fiscal decentralization in Indonesia, particularly at the local government level. This study aims to analyze the role of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) in promoting transparency and accountability in the financial management of the Kupang City Government. Employing a qualitative descriptive approach, the research utilizes secondary data derived from BPK Audit Reports (LHP), Local Government Financial Reports (LKPD), and relevant regulatory documents. Data were analyzed through document review, data reduction, and interpretative analysis to identify patterns of audit findings and follow-up actions. The findings indicate that BPK audits contribute significantly to improving the quality of financial reporting, strengthening internal control systems (SPIP), and enhancing public access to financial information. In Kupang City, audit recommendations have encouraged improvements in asset administration, expenditure effectiveness, and regulatory compliance. Moreover, the level of follow-up on audit recommendations reflects a growing institutional commitment to accountability. This study concludes that BPK audits play a strategic role not only as a supervisory mechanism but also as a catalyst for strengthening good governance and public trust in local financial management.

Keywords: Audit BPK, Transparency, Accountability, Local Finance

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, khususnya dalam era desentralisasi fiskal di Indonesia. Pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah melalui kebijakan otonomi daerah menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas atas setiap penggunaan anggaran publik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), karena memungkinkan masyarakat untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan publik (Mardiasmo, 2021; Bovens, 2020).

Dalam konteks tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memegang peran strategis sebagai lembaga audit eksternal yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui pemeriksaan atas laporan keuangan, audit kinerja, dan audit kepatuhan, BPK tidak hanya memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi juga menyampaikan temuan serta rekomendasi perbaikan yang wajib ditindaklanjuti. Audit BPK berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan, penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), serta pencegahan potensi penyimpangan anggaran (Ahyar et al., 2021; Hardiningsih et al., 2019).

Namun demikian, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) belum sepenuhnya mencerminkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah secara substansial. Mustikarini dan Fitriasari (2020) mengungkapkan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP tetapi tetap memiliki temuan audit terkait kelemahan pengendalian internal, pengelolaan aset, serta kepatuhan terhadap regulasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas audit BPK tidak hanya ditentukan oleh kualitas pemeriksaan, tetapi juga oleh komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi audit secara konsisten dan berkelanjutan (Setiyawati, 2020).

Permasalahan tersebut juga relevan dengan kondisi Pemerintah Kota Kupang sebagai salah satu pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi anggaran menuntut pemerintah daerah untuk menyediakan laporan keuangan yang dapat diakses, dipahami, dan dipercaya oleh publik. Di sisi lain, Pemerintah Kota Kupang masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain penatausahaan aset yang belum optimal, efektivitas belanja yang perlu ditingkatkan, serta penguatan implementasi SPIP. Audit BPK menjadi mekanisme penting dalam mengidentifikasi permasalahan tersebut sekaligus mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah secara sistematis (Wicaksono, 2020).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pengaruh audit BPK, SPIP, dan tindak lanjut rekomendasi audit terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah. Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dan berfokus pada hubungan statistik antarvariabel. Kajian yang menelaah secara kualitatif bagaimana audit BPK berperan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta perubahan praktik pengelolaan keuangan pada tingkat pemerintah kota masih relatif terbatas, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur (Mahmudi, 2019; Bovens, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran audit BPK dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Kupang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian akuntabilitas sektor publik serta kontribusi praktis sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam memperkuat pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

LANDASAN TEORI

Akuntabilitas Sektor Publik

Akuntabilitas sektor publik merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif untuk menyampaikan laporan keuangan, tetapi juga sebagai tanggung jawab substantif pemerintah dalam menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan menerima konsekuensi atas setiap keputusan dan penggunaan sumber daya publik. Dalam perspektif tata kelola modern, akuntabilitas menjadi mekanisme utama untuk memastikan bahwa kekuasaan publik dijalankan secara sah, transparan, dan beretika (Christensen et al., 2020).

Akuntabilitas publik mencakup berbagai dimensi, antara lain akuntabilitas hukum, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas politik. Setiap dimensi tersebut saling terkait dan menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya patuh terhadap peraturan, tetapi juga mampu menunjukkan hasil nyata dari penggunaan anggaran publik (Schillemans & Bovens, 2020). Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang andal, penyampaian informasi yang terbuka kepada publik, serta kesediaan untuk diaudit oleh lembaga pemeriksa independen.

Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Transparansi merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya akuntabilitas publik. Transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat terkait kebijakan, proses penganggaran, dan realisasi keuangan daerah. Tanpa transparansi, publik tidak memiliki dasar yang memadai untuk menilai kinerja pemerintah secara objektif (Meijer et al., 2019).

Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi diwujudkan melalui publikasi dokumen anggaran, laporan realisasi anggaran, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), serta laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK. Studi Cuadrado-Ballesteros et al. (2020) menunjukkan bahwa tingkat transparansi yang tinggi berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan publik dan menurunkan risiko penyalahgunaan anggaran. Oleh karena itu, transparansi tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai alat pengawasan sosial yang efektif.

Audit Sektor Publik dan Peran Badan Pemeriksa Keuangan

Audit sektor publik merupakan mekanisme pengawasan eksternal yang bertujuan untuk menilai kewajaran, kepatuhan, dan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan sebagai lembaga audit eksternal yang independen dan memiliki mandat konstitusional untuk memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara. Audit BPK mencakup audit atas laporan keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu, yang masing-masing memiliki kontribusi dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah (Lapsley & Miller, 2019).

Audit BPK tidak hanya menghasilkan pendapat atas kewajaran laporan keuangan, tetapi juga temuan dan rekomendasi yang berfungsi sebagai instrumen perbaikan tata kelola. Menurut Power (2021), audit publik yang efektif mampu mendorong perubahan perilaku organisasi melalui tekanan institusional dan peningkatan kesadaran akan pentingnya kepatuhan dan integritas. Dengan demikian, audit BPK berperan sebagai katalis yang mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelaporan, pengendalian internal, dan transparansi keuangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi pemerintah, khususnya dalam hal efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP menjadi elemen penting dalam mencegah kesalahan, kecurangan, dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah (COSO, 2019).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa efektivitas SPIP memiliki hubungan erat dengan kualitas laporan keuangan dan tingkat akuntabilitas pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan sistem pengendalian internal yang kuat cenderung memiliki lebih sedikit temuan audit dan tingkat tindak lanjut rekomendasi yang lebih tinggi (Sofyani & Akbar, 2020; Yurniwati et al., 2021). Oleh karena itu, penguatan SPIP menjadi salah satu fokus utama rekomendasi audit BPK dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.

Hubungan Audit BPK, SPIP, Transparansi, dan Akuntabilitas

Secara konseptual, audit BPK, SPIP, transparansi, dan akuntabilitas merupakan elemen yang saling berkaitan dalam kerangka good governance. Audit BPK berfungsi sebagai mekanisme evaluasi dan kontrol eksternal, sementara SPIP berperan sebagai pengendalian internal yang memastikan proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan. Transparansi menjadi medium yang memungkinkan publik mengakses informasi, sedangkan akuntabilitas merupakan tujuan akhir dari keseluruhan proses tersebut (Grossi et al., 2020).

Dengan demikian, efektivitas audit BPK dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas SPIP dan komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi audit. Ketika rekomendasi audit diimplementasikan secara konsisten dan didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai, maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat terwujud secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Kupang. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran hubungan kuantitatif antarvariabel, melainkan pada analisis proses, konteks, serta dinamika penerapan hasil audit dalam praktik pengelolaan keuangan daerah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan makna dan implikasi audit BPK secara komprehensif dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah (Creswell & Poth, 2019).

Objek penelitian adalah Pemerintah Kota Kupang sebagai entitas pemerintah daerah yang secara rutin menjadi objek pemeriksaan BPK. Penelitian ini difokuskan pada praktik pengelolaan keuangan daerah, khususnya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Periode pengamatan mencakup beberapa tahun terakhir setelah penerapan regulasi pengelolaan keuangan daerah yang terbaru, sehingga hasil penelitian diharapkan mencerminkan kondisi aktual tata kelola keuangan Pemerintah Kota Kupang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Sumber data meliputi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Pemerintah Kota Kupang, dokumen LKPD, laporan tindak lanjut rekomendasi audit, serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan data sekunder dipilih karena dokumen-dokumen tersebut merupakan sumber resmi yang mencerminkan kondisi riil pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah (Bowen, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pengumpulan, dan penelaahan dokumen secara sistematis. Setiap dokumen dianalisis untuk mengidentifikasi jenis temuan audit, rekomendasi yang diberikan, serta respons pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Proses ini dilakukan secara berulang untuk memastikan konsistensi informasi dan memperkuat validitas temuan penelitian. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian disajikan secara naratif dan tematik untuk memudahkan interpretasi (Miles et al., 2020).

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi untuk memastikan kesesuaian dan keandalan data. Selain itu, analisis dilakukan secara cermat dengan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teori dan hasil penelitian terdahulu, sehingga kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar konseptual dan empiris yang kuat. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif dan mendalam mengenai kontribusi audit BPK dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Kupang.

HASIL PENELITIAN

Peran Audit BPK dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Kupang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran signifikan dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Kupang. Berdasarkan analisis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan dokumen tindak lanjut rekomendasi, audit BPK tidak hanya berfungsi sebagai penilaian formal atas kewajaran laporan keuangan, tetapi juga menjadi mekanisme evaluasi terhadap kepatuhan pemerintah daerah terhadap regulasi dan efektivitas pengelolaan anggaran.

Audit atas laporan keuangan mendorong peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), terutama dalam aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemerintah Kota Kupang menunjukkan perbaikan dalam penyajian laporan keuangan, yang tercermin dari konsistensi perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, BPK masih menemukan kelemahan nonmaterial yang memerlukan tindak lanjut, terutama terkait pengelolaan aset tetap dan administrasi belanja.

Temuan Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa temuan audit BPK berperan sebagai pemicu perbaikan tata kelola keuangan daerah. Temuan audit yang berkaitan dengan kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), ketidaktertiban administrasi aset, serta ketidaksesuaian prosedur belanja telah mendorong pemerintah daerah untuk

melakukan pembenahan internal. Data tindak lanjut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kupang secara bertahap meningkatkan tingkat penyelesaian rekomendasi audit, baik melalui pengembalian keuangan, perbaikan sistem, maupun penyempurnaan prosedur administrasi.

Tingkat penyelesaian rekomendasi audit mencerminkan adanya komitmen organisasi dalam memperkuat akuntabilitas keuangan. Meski masih terdapat rekomendasi yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti, tren penyelesaian menunjukkan arah perbaikan yang konsisten. Hal ini mengindikasikan bahwa audit BPK berfungsi tidak hanya sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran institusional bagi pemerintah daerah.

Audit BPK dan Transparansi Informasi Keuangan

Dari aspek transparansi, hasil penelitian menunjukkan bahwa audit BPK turut mendorong peningkatan keterbukaan informasi keuangan di Pemerintah Kota Kupang. Publikasi ringkasan laporan keuangan, informasi anggaran, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan melalui media resmi pemerintah daerah menjadi indikator meningkatnya komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Meskipun tingkat pemanfaatan informasi oleh masyarakat masih bervariasi, ketersediaan informasi keuangan yang lebih terbuka memperkuat mekanisme pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pembahasan

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa audit BPK memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Studi Sofyani dan Akbar (2020) menunjukkan bahwa audit eksternal berperan penting dalam memperbaiki kepatuhan dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, terutama ketika rekomendasi audit ditindaklanjuti secara serius. Hal ini sejalan dengan temuan di Kota Kupang, di mana audit BPK mendorong perbaikan administratif dan penguatan sistem pengendalian internal.

Konsistensi perolehan opini WTP oleh Pemerintah Kota Kupang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai indikator keberhasilan administrasi keuangan, tetapi juga sebagai hasil dari proses pembelajaran organisasi yang dipicu oleh temuan dan rekomendasi audit. Penelitian Yurniwati et al. (2021) menegaskan bahwa pemerintah daerah dengan tingkat tindak lanjut rekomendasi audit yang tinggi cenderung memiliki sistem pengendalian internal yang lebih efektif dan jumlah temuan audit yang lebih rendah pada periode berikutnya. Temuan ini relevan dengan kondisi Kota Kupang yang menunjukkan perbaikan bertahap dalam pengelolaan aset dan kepatuhan prosedural.

Selain itu, temuan mengenai peningkatan transparansi informasi keuangan mendukung pandangan Meijer et al. (2019) yang menyatakan bahwa transparansi tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh dorongan institusional, termasuk hasil audit eksternal. Audit BPK berperan sebagai tekanan eksternal yang mendorong pemerintah daerah untuk membuka akses informasi keuangan kepada publik. Namun, efektivitas transparansi tersebut tetap bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola informasi dan tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa audit BPK memiliki peran strategis dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah, tetapi dampaknya sangat dipengaruhi oleh kualitas tindak lanjut rekomendasi dan efektivitas SPIP. Tanpa komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, audit berpotensi berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif semata. Oleh karena itu, audit BPK

perlu dipandang sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan dalam kerangka good governance, bukan sekadar alat penilaian kinerja keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran strategis dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Kupang. Audit BPK tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan formal atas kewajaran laporan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif yang mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan daerah. Temuan audit dan rekomendasi yang diberikan BPK terbukti mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), memperkuat implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Pemerintah Kota Kupang tidak terlepas dari peran audit BPK dalam mengidentifikasi kelemahan nonmaterial dan mendorong tindak lanjut rekomendasi secara bertahap. Perbaikan dalam penatausahaan aset, administrasi belanja, dan pengelolaan kas merupakan bukti empiris bahwa audit BPK berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan daerah. Selain itu, audit BPK juga berperan dalam mendorong keterbukaan informasi keuangan melalui penyediaan dan publikasi data keuangan yang lebih mudah diakses oleh publik, sehingga memperkuat mekanisme pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas audit BPK sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan secara substantif, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas aparatur pengelola keuangan, meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta memastikan koordinasi yang efektif antarorganisasi perangkat daerah dalam menindaklanjuti temuan audit. Bagi BPK, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan fungsi rekomendatif dan pembinaan agar audit tidak hanya berorientasi pada penilaian, tetapi juga pada perbaikan tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama karena menggunakan data sekunder dan berfokus pada satu pemerintah daerah, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas. Selain itu, penelitian ini belum menggali secara langsung persepsi aktor internal pemerintah daerah terkait implementasi rekomendasi audit. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam atau studi komparatif antar daerah guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran audit BPK dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyar, S., Manurung, K. I., Nurdin, M., & Pangestoeti, W. (2021). Peran audit BPK dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(2), 115-128.

Bovens, M. (2020). Accountability in public governance revisited. *Public Administration Review*, 80(1), 22-34.

Bowen, G. A. (2019). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 19(1), 27-40.

Christensen, T., Lægreid, P., & Rykkja, L. H. (2020). Organizing for public accountability: Accountability regimes in public sector organizations. *Public Administration Review*, 80(6), 1029-1041.

COSO. (2019). *Internal control—Integrated framework*. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2019). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Cuadrado-Ballesteros, B., García-Sánchez, I. M., & Prado-Lorenzo, J. M. (2020). The role of transparency in public sector accountability. *International Review of Administrative Sciences*, 86(3), 583-601.

Grossi, G., Reichard, C., & Ruggiero, P. (2020). Accountability and control in public sector reforms. *Public Money & Management*, 40(2), 91-100.

Guest, G., Namey, E., & Saldaña, J. (2020). *Collecting and analyzing qualitative data at scale*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Hardiningsih, P., Januarti, I., & Oktaviani, R. M. (2019). Sistem pengendalian intern pemerintah dan kualitas laporan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 16(2), 89-105.

Lapsley, I., & Miller, P. (2019). Transforming public sector audit: Managing complexity and change. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 32(4), 1016-1043.

Mahmudi. (2019). *Manajemen keuangan sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.

Meijer, A., Curtin, D., & Hillebrandt, M. (2019). Open government: Connecting vision and voice. *International Review of Administrative Sciences*, 85(3), 535-551.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Mustikarini, W. A., & Fitriasari, D. (2020). Pengaruh temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi BPK terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 4(1), 1-15.

Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2019). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 18, 1-13.

Power, M. (2021). Modelling the micro-foundations of the audit society. *Accounting, Organizations and Society*, 90, 101-108.

Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). London: Sage Publications.

Schillemans, T., & Bovens, M. (2020). Accountability in the public sector. In *The Oxford handbook of public accountability*. Oxford University Press.

Setiyawati, H. (2020). Peran SPIP dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Publik*, 3(2), 67-80.

Sofyani, H., & Akbar, R. (2020). The relationship between internal control, internal audit, and accountability in local governments. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 32(1), 1-20.

Wicaksono, K. W. (2020). Akuntabilitas publik dalam perspektif tata kelola pemerintahan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 45-58.

Yin, R. K. (2020). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Yurniwati, Y., Rizaldi, A., & Amelia, F. (2021). Internal control and audit findings in Indonesian local governments. *Asian Journal of Accounting Research*, 6(2), 172-186.